

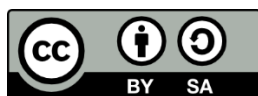
Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Ayu Khairur Rizqiyah¹, Hanantyo Sri Nugroho²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta, Indonesia

Email: hanantyo@amikom.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Effectiveness, Role of Social Welfare Workers (TKSK), Family Hope Program (PKH), Kapanewon Sewon Bantul Regency</p>	<p><i>The role of social welfare workers (TKSK) in sub-districts aims to make the distribution of aid from the government to poor families and recipients of the Family Hope Program in Sewon sub-district a success. This is the key to community welfare in Sewon Subdistrict. This study aims to determine the role of the sub-district Social Welfare Workers (TKSK) in the implementation of the family hope program to help people with Social Welfare Problems, and to find out what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the role of the District Social Welfare Workers (TKSK) in facilitating People with Social Welfare Problems (PMKS). Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. The results showed that the role of the District Social Welfare Workers (TKSK) has not played a good role in facilitating communities with Social Welfare Problems in Sewon sub-district and also assistance. This happened because of the limited ability of the Subdistrict Social Welfare Workers (TKSK) in dealing with communities with Social Welfare Problems in collaboration between the sub-district TKSK Social Welfare Workers and the government, PKH Coordinators, TKSK in the area, and fellow District Social Welfare Workers (TKSK). The form of assistance provided by the Government or Social Services is the Family Hope Program (PKH).</i></p>



Copyright © 2024 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and authors' affiliated institution.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004). Permasalahan pada kemiskinan memerlukan penanganan yang tepat untuk mengurangi

peningkatan kemiskinan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas pada masyarakat miskin. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Program Keluarga Harapan. Pada program ini diharapkan mampu

meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan permasalahan kemiskinan yang ada di Kapanewon Sewon. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kapanewon Sewon untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. PKH terdiri dari beberapa jenis bantuan yaitu dalam bidang Kesehatan, Indonesia Pintar, Bansos Rastra, Kelompok Usaha Bersama, dan Bantuan Langsung Tunai. Fokus penelitian ini peneliti membahas mengenai jenis kegiatan Program Keluarga Harapan Bantuan Langsung Tunai. Hal ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin dengan pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada ibu, untuk dapat mendorong anak tetap bersekolah (Nurul Najidah, 2013) sesuai dengan data yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul sebagai target sasaran bantuan. Untuk menangani masalah kemiskinan, Pemerintah Kapanewon Sewon memiliki berbagai program penanganan kemiskinan berbasis bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018. bahwasanya program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin. Kabupaten Bantul merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk termiskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah penduduk miskin 138,66 ribu jiwa pada tahun 2020. Menurut data hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2020 terdapat 138.66 ribu jiwa masyarakat miskin yang ada di kabupaten Bantul dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 146.98 ribu jiwa. Angka ini mengalami peningkatan karena pandemic covid-19 belum berakhir. Hal ini

dikarenakan masyarakat Kabupaten Bantul Sebagian masih berpendidikan rendah dan masih banyaknya pengangguran. Menurut data BPS Kabupaten Bantul 2020 Pengangguran lulusan SLTA sederajat sebesar 24,96 persen. Sedangkan pengangguran berpendidikan kurang dari atau sama dengan SLTP/sederajat sebesar 26,20 persen, terdiri dari pengangguran berpendidikan SD/sederajat sebesar 11,94 persen dan pengangguran berpendidikan SLTP/sederajat sebesar 14,26 persen.

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada masyarakat yang sangat miskin. Kondisi masyarakat di Kabupaten Bantul masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan karena kualitas SDM yang masih rendah dan keterbatasan lapangan pekerjaan serta upah minimum pekerja yang masih rendah. Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Akan tetapi implementasi pada program ini belum terlaksana dengan optimal karena pada dasarnya PKH di khususkan untuk masyarakat yang kurang mampu (Usman, 2014). Kenyataan dilapangan masih ada kecemburuan sosial akibat nominal bantuan yang tidak sedikit.

Keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah akan berjalan dengan baik jika peran pemerintah mampu untuk mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Peran Merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang-orang mencapai tujuan organisasi dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak dan mengerakan agar orang-orang mampu menerima pengaruh serta berbuat sesuatu untuk untuk mencapai

tujuan, dan yang paling penting dan harus mampu memberikan dorongan kepada anggota untuk bisa bekerjasama dengan penuh tanggung jawab (Ghufron, 2020). Artinya, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan penuh tanggung jawab dan mampu memberikan contoh kepada bawahannya dan maupun memberikan contoh dengan cara komunikasi dalam upaya meningkatkan tujuan serta visi dan misi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kapanewon Sewon.

Peran TKSK dalam pemerintahan dinilai menjadi faktor kunci dari keberhasilan suatu pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Penanganan permasalahan sosial terutama kemiskinan merupakan tugas pemerintah dan masyarakat khususnya TKSK dan Kordinator PKH. Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No 24 Tahun 2013 tentang TKSK mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa peran TKSK begitu penting, menginggit TKSK memiliki posisi yang baik sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dalam proses ini pada pelaksanaan tugas di kapanewon pasti ada beberapa kendala, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya tidak memiliki hambatan dan kendala dalam menangani permasalahan sosial terutama kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk melihat peran TKSK dalam program PKH. Keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh peran yang baik dengan dukungan pemerintah maka pelayanan yang diberikan kepada pada program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat miskin dapat terwujud. Masalah maupun kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu kekurangannya adalah kurangnya koordinasi serta arah dari pemimpin yang mengakibatkan program belum berjalan secara Optimal. Pemimpin sebagai pemegang peran dalam pemerintahan seharusnya harus cepat tanggap dalam mengelola bawahannya untuk dapat mencapai tujuan dari visi misi Program Keluarga Harapan (PKH) desa untuk kesejahteraan masyarakat dan pemimpin yang baik dalam mengelola bawahannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan ini mengasumsikan bahwa penelitian untuk mengetahui masalah yang ada dan belum teridentifikasi. Dengan mengambil topik tentang efektivitas peran pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, penelitian ini menggunakan konsep teori peran dari David Berry. David Bery menurutnya didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terdapat pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang dikenalkan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Selain itu, pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 yaitu mengemukakan adanya 3 Peran pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai Fasilitator, Mediator, Dan

Dinamisator, sehingga penelitian ini akan melihat ketiga peran tersebut dalam program keluarga harapan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul "Efektivitas Peran Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul".

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari informasi baik lisan di kumpulkan dan diajikan dalam bentuk kalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti langsung terjun kelapangan dengan menggunakan observasi wawancara langsung terhadap narasumber (Siti Nur Aisah, 2020). Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif adalah peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan secara spesifik, transparan dan lebih mendalam. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi sehingga data yang akan dikumpulkan bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi Efektivitas Peran Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Pendekatan ini mengansumsikan bahwa penelitian untuk mengetahui masalah yang ada dan belum teridentifikasi. Dengan adanya penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan untuk dapat melihat secara mengetahui Efektivitas Peran Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Dengan hal ini harus ada Kerjasama antara aparat pemerintah Kapanewon Sewon. Pengambilan data dan analisis data

dilakukan terus menerus hingga terpenuhi, Sehingga data karakteristik jelas dan dapat di olah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai presepsi serta petunjuk yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai obyek studi yang di teliti serta hasil dan solusi yang di peroleh setelah penelitian ini berlangsung. Pengupulan data pada penelitian kualitatif adalah untuk mencari data dengan interaksi dengan informan dan subyek yang diteliti Tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Pada tehnik ini, peneliti menfokuskan pada objek yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tehnik wawancara ini peneliti ingin melihat dan mengali data dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan yang diteliti (Rijali, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial di wilayah dengan kondisi sosial secara khusus, dengan bantuan sosial berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga yang rentan terhadap resiko sosial. Kapanewon sewon merupakan daerah yang berada di kabupaten Bantul yang juga mempunyai masalh sosial seperti kemiskinan dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang berada di Kapanewon sewon dalam upaya pengentasan kemiskinan yang pada Dinas Sosial pemerintah Kapanewon Sewon melibatkan pendamping PKH dan peserta PKH yang sesuai syarat dan ketentuan. Hasil penelitian dilapangan mayoritas Keluarga Penerima Manfaat PKH memiliki latar Pendidikan yang kurang, sehingga keahlian yang dimiliki penerima

bantuan juga masih kurang. Karena keterbatasan kemampuan ini tidak jarang pendamping selalu memberikan arahan serta pendampingan agar para penerima manfaat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri, jika para penerima tidak sanggup dan tidak mau menerima masukan dari pendamping maka akan dikenakan sanksi berheni dari peserta penerima Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat dengan bersyarat yang ditujukan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sebagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Kapanewon Sewon, sikap pemerintah Kapanewon sewon, yakni TKS serta pendamping PKH secara umum sudah baik, hanya saja beberapa peserta PKH yang kurang baik dari sisi tanggung jawab atas apa yang sudah diberikan tetapi tidak dilaksanakan, dengan masalah tidak menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, keterlambatan administrasi pada saat pencairan PKH di Bank BNI, tidak mematuhi bimbingan yang diberikan oleh pendamping dalam hal peningkatan kualitas keahlian yang telah dimiliki peserta untuk bisa membantu Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam upaya Pengentasan Kemiskinan. Dalam menentukan focus dalam implementasi program keluarga harapan di Kapanewon Sewon dapat diuraikan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Bagus Ajik Suryanto Sebagai pendamping Program PKH di Kapanewon sewon mengatakan bahwa:

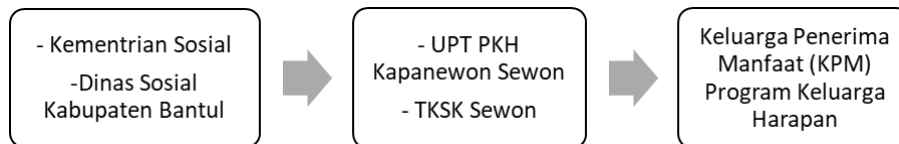
"sejauh ini untuk implementasi program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon sudah berjalan dengan baik, terutama para peendaming PKH nya sudah menjalankan tugas dan tupoksinya sesuai dengan tanggung jawab kerja masing-masing di setiap kalurahan sampai dengan padukuhan. Dari kerapian administrasi dan pelaporan setiap pendamping mengenai kinerjanya di lapangan selama mendampingi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Tetapi memang masih ada beberapa masalah yang harus segera di tindak lanjuti mengenai penerima manfaat yang masih ngeyel, ngeyel dalam artian tidak tertib administrasi, keterlambatan pengumpulan berkas serta tidak memanfaatkan bantuannya dengan semestinnnya, yang harusnya bantuan dipergunakan untuk membeli bahan pokok tetapi di gunakan untuk hal lain yang tidak terlalu penting, karena masih menjumpai masyarakat penerima PKH yang seperti ini, ada tetapi tidak banyak." (wawancara 29/03/2022)

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan teori Edwards III dengan adanya empat faktor yang mempengaruhi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengaruh keempat faktor pada implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon adalah sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi kebijakan Program Keluarga Harapan merupakan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan disampaikan kepada sasaran kebijakan dan beberapa pihak yang berkepentingan. Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan kebijakan Program Keluarga Harapan, sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal terjadi antara pejabat Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial yaitu pejabat struktural Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan pejabat Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Program PKH Kapanewon Sewon serta TKSK. Komunikasi internal yang diampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non-formal seperti perintah langsung yang diberikan kepada bawahannya. Komunikasi eksternal terjadi antara Dinas Sosial, TKSK dan UPTPKH dengan KPM PKH. Dalam komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dilapangan, apa saja yang harus dilakanakan untuk mencapai tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan dapat terwujud. Arus komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Arah Komunikasi Pada Program PKH

Hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat ibu Rini menyebutkan bahwa Kejelasan Informasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup jelas, hal ini dapat dilihat dari setiap sosialisasi dan koordinasi yang diadakan oleh pemerinth Kapanewon Sewon sebagai berikut.

"Saya sebagai masyarakat penerima bantuan ini selalu mendapatkan informasi dan bimbingan pada saat koordinasi pertemuan dengan pendamping sudah lumayan jelas mbak, karena setiap setiap bulan pasti selalu ada koordinasi dengan pendamping PKH" (wawancara 29/03/2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi pada implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sudah cukup baik, dikarenakan penyampaian informasi

yang sudah jelas dan membuat masyarakat paham dalam memahami informasi yang diampaikan oleh pendamping PKH.

Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan pada implementasi kebijakan karena kebijakan memerlukan ukungan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran untuk bisa melaksanakan implementasi kebijakan. Sudah ada tupoksi kusus bagi pendamping PKH Kapanewon Sewon sesuai dendan Perda.

"Untuk SDM nya sendiri PKH Kapanewon Sewon ini tugasnya pendamping sama mba, hanya beda di tempat pendampingannya saja, setiap pendamping sudah di berikan tugas untuk memegang beberapa

padukuhan yang ada di Kapanewon Sewon ini, (hasil wawancara dengan koordinator PKH Kpanewon Sewon)" (wawancara 29/03/2022)

Sumber daya anggaran dari APBD yang disisihkan untuk Program Keluarga Harapan. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan sesuai dengan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 untuk tahun 2020

diharapkan angka kemiskinannya menjadi 10,86%. Anggaran yang dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan yang berasal dari APBD dan harus sesuai dengan peraturan Kemendagri No.32 tahun 2011. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka penanggulangan kemiskinan Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2022 ini meliputi:

Tabel 1. Data Penerima PKH Anggaran 2022 Setiap Kalurahan

Alamat				Besaran penerimaan
RT	Pedukuhan	Kalurahan	Kapanewon	
7	Jotawang	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
1	Jurug	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
3	Ngoto	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
2	Pandeyan	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
8	Randubelang	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
3	Semail	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
2	Widoro	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
4	Wojo	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
1	Dongkelan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
8	Dongkelan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
2	Garon	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
3	Glondong	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
2	Glugo	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
3	Glugo	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
6	Jaranan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
1	Krapyak wetan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
6	Krapyak wetan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
8	Krapyak wetan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
11	Krapyak wetan	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
1	Pandes	Panggunharjo	Sewon	3.000.000
70	Banyon	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
94	Banyon	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
47	Blunyahan	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
7	Cepit	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
57	Diro	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
58	Diro	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
61	Diro	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000

19	Krandohan	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
23	Miri	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
21	Ngimbang	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
54	Pucung	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
54	Pucung	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
63	Rogoitan	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
87	Rogoitan	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
93	Rogoitan	Pendowoharjo	Sewon	3.000.000
1	Balong	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Balong	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
3	Balong	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
1	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
3	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
3	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
5	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
5	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
6	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
7	Bibis	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
8	Dagan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
1	Gabusan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Gabusan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
7	Gabusan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Gatak	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
6	Gatak	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
3	Kowen II	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
1	Kowen II	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
6	Kowen II	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Mriyan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
3	Mriyan	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
1	Ngentak	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Ngentak	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
2	Ngentak	Timbulharjo	Sewon	3.000.000
	Demangan	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
	Druwo	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
	Druwo	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
	Gatak	Bangunharjo	Sewon	3.000.000
	Jumlah			192.000.000

Sumber: Keputusan Bupati Bantul Nomor 234 Tahun 2022

Disposisi

Program PKH merupakan Tim koordinasi penanguangan kemiskinan Bersama TKSK yang berkoordinasi serta bersinergi untuk mengentaskan masalah

kemiskinan. PKH merupakan Program Lintas Kementerian dan Lembaga, Impementasi program keluarga harapan di Kapanewon Sewon tidak akan terwujud tanpa adanya koodinasi

yang baik antara aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi PKH. Maka dari itu agar lebih maksimal penyaluran bantuan PKH di Kapanewon Sewon selalu di pantau oleh PKH dan TKSK Kapanewon Sewon.

Program Keluarga Harapan dalam kelancaran programnya tentu ada peran pendamping yang membantu dengan baik, karena pendamping merupakan aktor yang langsung bertemu dengan penerima bantuan maka harus terjalin hubungan yang baik.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul menggambarkan dengan jelas pemisah kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan fungsi yang dibatasi. Dalam struktur organisasi koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai pejabat tinggi Daerah dimana setiap bagian organisasinya terhubung dengan pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi program, maka hal tersebut akan menyebabkan tidak efektifnya dan terhambatnya alur pelaksana program. Sedangkan, berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH di Kecamatan Sewon, Mbak Dias mengatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan PKH sejauh ini untuk Kapanewon Sewon sudah sesuai dengan prosedur karena setiap waktu dilakukan pemutakhiran data, bahkan setelah penyaluran bantuan juga akan dilakukan validitas data yang sesuai". (wawancara 29/03/2022)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, penulis melihat bahwa prosedur ataupun aturan yang berkenaan dengan program keluarga harapan telah diikuti dan ditaati oleh

pengelola dan pelaksana program sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam implementasi program terdapat struktur organisasi dalam pelaksana PKH. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Dias selaku pendamping di Kecamatan Sewon mengatakan bahwa:

"Struktur organisasi PKH dimulai dari Kemensos, Dinsos DIY, Dinsos Kabupaten Bantul, Kecamatan, dan Pendamping". (wawancara 29/03/2022)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi pada pelaksanaan program PKH Kapanewon Sewon keMenterian Sosial sebagai penanggung jawab dari setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan monitoring serta evaluasi dari Program Keluarga Harapan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas untuk bisa memberikan arahan serta mekanisme kegiatan yang dilakukan oleh UPPKH Kapanewon Sewon. Fungsi dari UPPKH dan TKSK melakukan koordinasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait bantuan PKH serta mengontrol jalannya Program PKH di Kapanewon Sewon.

Sumber daya yang memadai merupakan sarana pendukung berjalannya program PKH dengan baik bagi Keluarga Penerima Manfaat. Ketika peserta PKH diberikan bantuan cara pengolahan dana bantuan dengan penyuluhan kreativitas dan pengembangan keahlian yang disampaikan oleh pendamping PKH untuk mendorong potensi keahlian penerima manfaat yang bisa dikembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk keluar dari zona kemiskinan. Dinas telah memberikan kewenangan kepada TKSK maupun bidang Pemberdayaan Bantuan dan jaminan sosial untuk membantu mensukseskan Program Keluarga Harapan, berikut penjelasan dari bapak Bagus Ajik Suryanto pendamping

Kapanewon sewon

"Ada beberapa hal yang sangat penting dalam menjalankan program PKH ini, salah satunya adalah sumber daya dari PKH untuk dapat mendampingi para penerima manfaat, kalo untuk sumber daya penamping minimal harus memiliki Pendidikan paling rendah S1 dan harus mempunyai jiwa sosial karena merekalah yang langsung ke lapangan untuk mendampingi para penerima mafaat dan mereka juga harus dekat dengan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat dalam mengelola dana yang diberikan oleh PKH kepada penerima, pendamping juga yang memberikan motivasi serta arahan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki setiap penerima. Disisi lain peranan TKSK dalam implementasi PKH ini sangat penting karena TKSK juga harus mampu membantu dinas sosial dalam mensukseskan program ini" (wawancara 29/03/2022)

Hasil wawancara peneliti I atas dapat dicermati bahwa, sumber daya dari PKH Kapanwon Sewon harus memiliki Pendidikan minimal S1 dan juga memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, karena tugas Pendamping PKH dilapangan langsung bertemu dengan masyarakat. Dengan hal ini PKH dan TKSK memiliki peranan penting dalam implementasi program yang dijalankan.

Pembahasan

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 28 Tahun 2018 terdapat pada pasal 3 yang berbunyi: 1. TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang TKSK 2. TKSK mempunyai wilayah kerja di 1 kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan. Dalam Pasal 4 yang berbunyi: Tugas TKSK membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan, Tugas TKSK dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan atau tanpa imbalan. Maksudnya jika TKSK membantu penyelesaian masalah sosial TKSK membantunya Tidak Mengharapkan Imbalan itu tergantung dari masyarakat yang dibatunya, Tugas TKSK di koordinasikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat Kecamatan, TKSK melakukan Tugasnya terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Kecamatan, TKSK dapat bekerja sama dan menyinergikan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Program Pembangunan lainnya.

Fungsi TKSK dalam pasal 5 Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 28 Tahun 2018 yaitu 1) Koordinasi, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat atau PPKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dalam bentuk saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2) Fasilitasi, merupakan upaya untuk membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan

sosial, kemitraan atau rujukan yang berguna untuk meningkatkan keberfungsian Sosial. 3) Administrasi, merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan dan pelaporan. Adapun yang menjadi sasaran Tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) adalah individu, kelompok maupun masyarakat penyandang Masalah kesejahteraan sosial.

Berikut ini peran TKSK dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul:

a. Koordinator

Peran tenaga kesejahteraan sosial di Kapanewon Sewon dalam menjalankan program keluarga harapan untuk mengentaskan kemiskinan sudah tercermin dalam program ini. TKSK hadir membantu sebagai penyalur dalam pelaksanaan bantuan serta menjaga kelancaran penyaluran bantuan seperti bahan pokok atau sembako. Dalam menjalankan perannya sebagai coordinator, TKSK Kapanewon Sewon memberikan solusi disetiap permasalahan yang muncul dari masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan social terutama kemiskinan. Berikut hasil wawancara dengan TKSK Kapanewon sewon Bapak Junaidi:

"Sesuai dengan fungsi saya sebagai koordinator saya berusaha memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat sesuai dengan kemampuan saya, seperti mengajukan surat permohonan bantuan kepada dinas terkait untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan, sebagai TKSK untuk program PKH saya ikut jaringan sosial yang dapat menghubungkan masyarakat

dalam memperoleh layanan social, karena program PKH sendiri masih diperlukan coordinator untuk membantu pendamping PKH untuk terjun ke masyarakat secara langsung."

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa TKSK Kapanewon Sewon dalam perannya sebagai coordinator sudah cukup baik, karena dapat menangani permasalahan yang muncul pada program PKH dan memperoleh jaringan social untuk bisa memperoleh pelayanan yang baik disetiap kegiatan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Fasilitator

Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menangani masyarakat penerima bantuan PKH di Kapanewon Sewon dilihat dari perannya TKSK membantu masyarakat dalam pendataan maupun verifikasi data serta mendampingi penyaluran sembako. Keberhasilan dan kegagalan suatu program pemerintah dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, tujuan dari program keluarga harapan adalah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia Termasuk Kapanewon Sewon, tidak hanta untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin tetapi juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik yang efektif. karena setiap program memiliki tujuan. Berikut wawancara dengan TKSK Kapanewon sewon Bapak Junaidi:

"Mengatasi kemiskinan itu bukan hal yang gampang mbak, PKH sendiri sudah ada data-data by name yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bisa dilihat dari data PKH 2021-2022 terjadi naik dan turun jumlah penerimannya, dalam program ini

saya membantu untuk menyalurkan bantuan dan menerima masukan dari masyarakat, pada saat pendampingan dan sosialisasi dilapangan saya ikut serta mendampingi bersama dengan coordinator program PKH Mas Aji dan para pendamping Program PKH Kapanewon Sewon"

Menurut hasil wawancara dilapangan, TKSK sudah berupaya untuk membantu Koordinator PKH dalam mengatasi permasalahan yang muncul pada program PKH telah membuahkan hasil yang positif. Tidak terlepas dari peranan TKSK sebagai mitra dalam pelaksanaan program Keluarga harapan yang bersumber dari kementerian social dan program penanggulangan kemiskinan untuk dapat mencapai tujuan yaitu mengurangi kemiskinan.

c. Administrator

Pada peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapanewon Sewon dalam menangani masyarakat fakir miskin sebagai administrator ditunjukkan ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, pendataan dan validasi data di wilayah ini bagi masyarakat penerima manfaat Bantuan di daerah Kapanewon Sewon. Kegiatan ini sangat penting, dengan mengumpulkan data dan berbagai informasi bagi masyarakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi penerima bantuan, sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran. Dalam Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh TKSK Kapanewon Sewon, tujuan tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerima prioritas program bantuan Program Keluarga Harapan adalah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat berpenghasilan

rendah dengan tanggungan anak, dan lansia. Mengenai bentuk lain dari peran TKSK Kapanewon Sewon sebagai administrator, serta mengawasi dan membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan menyerahkannya ke dinas sosial di Kabupaten Bantul.

Efektivitas Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan TKSK Kapanewon Sewon Sebagai berikut:

"setiap kali kegiatan maupun program yang saya jalankan ada target yang saya buat untuk meminimalisir tingkat keberhasilan dari program yang saya kerjakan, saya juga selalu mengagendakan koordinasi dengan tingkat kalurahan dan sewon ini ada 4 kalurahan jadi saya harus bisa menyesuaikan dengan empat kalurahan tersebut" (wawancara dengan junaidi TKSK 02/08/22)

Dengan demikian efektivitas adalah kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil wawancara diatas peran TKSK Kapanewon sewon sebagai koordinator sudah dijalankan sesuai dengan keadaan di lapangan dan

dapat dijalankan dengan baik.

Menurut Daryanto (1997) peran adalah seperangkat tugas yang dilakukan oleh pemimpin berdasarkan status atau kedudukannya yang formal, status pemimpin yang memiliki otoritas formal yang menuntut dia untuk melakukan perannya dalam melaksanakan peran pemimpin, maka tindakannya berpedoman pada kaidah, prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004) menyatakan peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, serta peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran adalah mengukur sejauhmana kesesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan status atau kedudukannya yang formal dengan apa yang dilakukan secara faktual.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam wawancara dengan TKSK bapak Junaidi menyatakan sebagai berikut:

"TKSK menurut saya sebagai ujung tombak keberhasilan suatu program, tetapi dengan TKSK yang hanya satu di setiap kecamatan agak sedikit kuwalahan, saya selalu mendampingi setiap kegiatan jika tidak ada kegiatan yang prioritas lain, masyarakat sendiri sebagai partisipan sosial yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial,

hal ini yang selalu saya sampaikan pada saat sosialisasi kepada masyarakat." (Wawancara dengan Junaidi TKSK 02/08/22)

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa TKSK adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah mem peroleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

Peran dan Solusi Pendamping Sosial TKSK dalam Meningkatkan Kesejahteraan KPM Pendamping bantuan sosial pangan, koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (PKH) sebagai pendamping mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran setiap program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, khususnya Bansos, PKH, hingga KPM. TKSK berperan sebagai registrasi, pengantiaan data, kontak informasi, dan pengaduan. Berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tentang Penetapan Pendamping Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah I dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bernomor: 515/PFM.PFMPD/KPTS/12/2017.

KORTEKS mempunyai tugas sebagai berikut: Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi by name by address Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai. Wawancara dengan TKSK Kapanewon Sewon:

"Dalam saya menjalankan tugas memang ada beberapa hambatan yang harus saya lalui, melihat wilayah kapanewon sewon merupakan salahsatu Kapanewon terbesar sekabupaten Bantul dan penduduk yang paling padat, saya cukup kuwalahan pada saat pendataan dan validasi data, untuk setiap program yang saya sosialisasikan saya dibantu dengan jajaran dari kalurahan untuk bersosialisasi kemasyarakat terkait kemiskinan, bantuan dan validasi data" (wawancara dengan junaidi TKSK 02/08/22)

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sangat berat karena di Kecamatan Tampan memiliki masalah sosial yang cukup banyak dan cakupan wilayah yang luas, membuat Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) mengalami kendala dalam melakukan pendataan, sehingga perlu adanya penambahan jumlah anggota setiap kecamatan, agar Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK) dapat melakukan pendataan masyarakat masalah kesejahteraan sosial lebih luas lagi. Dan perlu adanya sosialisasi di kecamatan bahwa disetiap kecamatan itu memiliki TKSK agar masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan sosial tidak kesulitan dalam melaporkan permasalahan yang dihadapi. Diharapkan bagi masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial maupun pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Dan diharapkan kepada seluruh TKSK

untuk saling berkolaborasi untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada di kecamatan masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa komponen yang menjadi focus utama dari program PKH adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Peserta PKH memiliki kewajiban yaitu menghadiri pertemuan koordinasi, mendaftarkan anak kesatuan pendidickn, memenuhi komitmen sebagai penerima manfaat. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi program Keluarga Harapan Faktor pendukung dilihat dari Sumber Daya Finansial Pelaksanaan program tidak terlepas dari faktor pendukung. pada penelitian ini PKH cukup mendukung finansial yang dapat menentukan kesuksesan tujuan program ini. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok masyarakat yang berada digaris kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut Ayu Fitriyana Cahyani selaku pendamping PKH Kapanewon Sewon menjelaskan bahwa:

"Pendapat saya mengenai dana yang disalurkan penerima bantuan PKH sudah terbilang cukup untuk mencukupi kebutuhan, biasanyya aya menanyakan kepada penerima mengenai dana yang diberikan mereka sudah cukup puas dan berterimakasih dengan adanya program ini. Selain itu juga menambah inovasi dengan adanya bantuan ini masyarakat dapat

sadar dan ingin segera bisa pulih ekonominya” (wawancara 01/04/2022)

Dari penjelasan ibu Ayu Fitriyana Cahyani ada beberapa faktor dari bantuan dana PKH yang menjadi faktor penting dari implementasi program. Sejuhu ini dengan sumber daya finansial yang cukup dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan. Berikut hasil wawancara dengan peserta penerima bantuan PKH ibu wahyuni mengenai bantuan yang diterima dari PKH:

"Kalo saya dari bantuan PKH ini sudah cukup baik dan bersyukur allhamdulillah mba dengan diberikannya bantuan ini sangat membantu perekonomian saya dan keluarga saya” (wawancara 01/04/2022)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam hal finansial bantuan PKH ini sudah cukup baik. Banyak dari penerima PKH juga mengatakan hal yang sama. Dengan adanya program ini diharapkan implementasi Program Keluarga Harapan di Kapanewon Sewon ini bisa berjalan dengan baik dengan terwujudnya tujuan dari program PKH.

Faktor penghambat dilihat dalam Implementasi program Keluarga Harapan salah satunya adanya Konflik antar individu. Pada implementasi program Keluarga Harapan ada beberapa faktor penghambat yang dapat berpengaruh terhadap implementasi program serta berpengaruh terhadap kinerja PKH dan TKSK. Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program ada beberapa faktor, ini wawancara Bersama Bagus Ajik Suryanto selaku pendamping PKH Kapanewon Sewon:

"kalau dari pandangan saya ya mbak, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat implementasi pelaksanaan Program Keluarga

Harapan dikapanewon Sewon ini yang pertama masyarakat masih kurang faham apa itu Program Keluarga Harapan, saya sendiri selaku pendamping masih kewalahan menjelaskan kepada masyarakat tentang PKH, banyak masyarakat yang memiliki kecemburuan sosial dan datang ke kapanewon untuk bisa mendapatkan bantuan PKH karena mereka merasa tidak mampu. Yang kedua masyarakat yang menerima bantuan PKH ini sebenarnya sudah di anggap mampu untuk bisa mengundurkan diri dari PKH tetapi mereka merasa bahwa mereka masih miskin, agar mereka tidak di berhentikan dari program ini. Biasanya yang menentukan mereka sudah mampu ini bukan dari kita PKH tapi langsung dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul, tentunya BPS sudah mengadakan survey terlebih dulu sebelum mengatakan hal itu, saya akui saya sendiri menjadi pendamping di 4 Kalurahan di sewon ini sebisa mungkin sudah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada KPM, tetapi sulit untuk memperhatikan satu-satu dari 3761 penerima manfaat PKH.” (Wawancara 01/04/2022)

Dari penjelasan bapak Bagus Ajik Suryanto selaku pendamping PKH Kapanewon Sewon diatas dapat disimpulkan Bahwa faktor penghambat yang menjadi konflik yang terjadi dimasyarakat dan kecemburuan sosial masalah yang lain yang sudah dijelaskan diatas menjadi faktor penghambat dalam implementasi program PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini yang sedikit memperlambat serta menghambat implemntasi program PKH di Kapanewon

Sewon. faktor penghambat keberhasilan program ada beberapa faktor, ini wawancara Bersama Bagus Junaidi selaku pendamping TKSK Kapanewon Sewon:

"Kalau dari saya mbak, faktor yang menghambat program itu terjadi antar individu itu ada, seperti yang tadi disampaikan mbak ayu. Sesuai keadaan dilapangan masih dijumpai KPM yang tidak sesuai dengan syarat sesuai dengan syarat sebagai penerima PKH. Masyarakat yang dianggap memenuhi syarat malah tidak dapat" (wawancara 01/04/2022)

Dari penjelasan Bapak Junaidi selaku TKSK Kapanewon Sewon diatas dapat disimpulkan Bahwa faktor penghambat yang menjadi konflik yang terjadi antara individu instansi terkait yaitu Dinas Sosial dengan masyarakat perannya belum maksimal dalam menjalankan suksesnya implementasi program PKH. Tetapi Dinsos sudah merasa melakukan verifikasi data secara terus menerus tetapi masalah itu muncul karna adanya kecemburuan sosial masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut TKSK Kapanewon Sewon selalu menerima masukan maupun saran dari masyarakat, jika masyarakat merasa benar-benar tidak mampu TKSK menyarankan untuk mengajukan bantuan seperti BLT melalui kalurahan sesuai dengan tempat domisili yang bersangkutan.

Faktor penghambat dan kendala TKSK dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, yakni 1) Wilayah kapanewon Sewon yang sangat luas dengan jumlah penduduk paling padat yang ada di Kabupaten Bantul membuat TKSK sedikit susah dalam membagi waktu untuk dilapangan mengingat hanya ada satu TKSK dalam setiap

Kapanewon, 2) Minimnya dana operasional untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sehingga tidak ada biaya makan dan transportasi yang diberikan kepada TKSK Kapanewon Sewon untuk membantu melaksanakan tugasnya di daerah ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, TKSK menggunakan dana dimana hanya 500.000 per bulan, dan hanya dapat diperoleh melalui laporan kerja setiap tiga bulan, 3) Kurangnya sarana transportasi dari dinas social untuk mendukung kinerja dan kegiatan pelayanan yang ada di Kapanewon Sewon dalam menjalankan perannya sebagai koordinator, fasilitator dan administrator.

Kesimpulan

Efektivitas peran TKSK yang efektif dapat diperoleh melalui data hasil wawancara serta data profil dan indicator Efektivitas pada TKSK, namun untuk mendapatkan hasil efektivitas peran TKSK dalam mengelola suatu program pengentasan kemiskinan, dapat dilakukan melalui peran TKSK yang berkualitas, sebaik apapun peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan tetap akan ada kekurangan (negatifnya) dan juga kelebihan (positifnya). pemerintahan yang maju sekalipun pasti ada kekurangannya. Namun untuk pemerintah kapanewon sewon yang memiliki tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sudah dijalankan cukup efektif dalam mengelola pemerintahan dengan baik, pasti mendapatkan penilaian dan respon terbaik dari masyarakat. Oleh karena itu, peran tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sudah efektif dengan menggunakan indikator: Peran hubungan antar perorangan, Fungsi peran informasi sebagai monitor, Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Efektivitas

Peran Pada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa peran TKSK sebagai tenaga kesejahteraan dalam program ini sudah cukup efektif dimana TKSK sudah berperan menjalankan informasi yang beliau dapat dari luar yang berdasarkan pada beberapa kegiatan beliau sebagai pemimpin sehingga beliau dapat memutuskan informasi yang didapat kedalam organisasi, melakukan perbaikan data, ada kritik dari masyarakat mengenai kecemburuan sosial. TKSK mempunyai peran strategis dalam tulisan ini, adalah kapasitas peran pendamping sosial TKSK untuk berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Diharapkan nantinya KPM akan mengalami perubahan sosial terutama peningkatan kesejahteraan atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan. Sebagai pendamping sosial TKSK perjuangan tugas yang diembannya cukup banyak, seperti banyaknya program bantuan sosial yang tumpang tindih karena ketidaksesuaian program dari pemerintah, belum lagi tidak terkoodinirnya bantuan sosial dari perseorangan maupun perusahaan atau lembaga sehingga menumpuk tidak dapat tersalurkan ke KPM, sementara masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial masih banyak. Hal ini, oleh para pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan program bantuan sosial adalah merupakan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu seiring dengan pelaksanaan tugas

tersebut terdapat hambatan yang menjadikan peran dan kapasitas pendamping program tidak optimal. Hambatan ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal yang bersumber dari diri pendamping TKSK sendiri, maupun faktor eksternal dari luar diri pendamping TKSK. beliau langsung meredam serta mengajak para pegawai agar berdiskusi atau mengadakan rapat internal untuk mengatasi setiap permasalahan. Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Kapanewon sewon berhasil dilaksanakan dengan cukup baik. Dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon, dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah Kapanewon dari sumber daya manusia, dan jajaran yang membutuhkan pemahaman untuk dapat mencapai tujuan serta target ketepatan sasaran, validasi data penerima. Maka peran dari struktur organisasi pemerintah Kapanewon sewon terutama Pendamping PKH dan TKSK dalam implementasi Program Keluarga Harapan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan dalam kebijakan.
2. Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon, dalam mencapai tujuan telah ditentukan sesuai dengan aturan dan SOP dan berjalan dengan baik. Harapan dengan adanya program PKH dapat mengurangi dan memutus rantai kemiskinan antar generasi sekarang dan masa yang akan datang menjadi lebih baik melalui peningkatan

- kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Sasaran Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon mengalami perubahan pada tahun 2021-2022. Pada tahap I Tahun 2021 peserta PKH Kapanewon sewon sebanyak 4440 peserta, tahap II sebanyak 4442. Pada tahap I-II 2021 Peserta PKH bertambah 2 peserta. Pada tahap III sebanyak 3927 peserta, dan pada tahap terakhir tahun 2021 sebanyak 3654 peserta. Pada Tahun 2022 peserta PKH menjadi 3761, perubahan bisa terjadi karena beberapa komponen atau aspek karena bertambahnya komponen kesejahteraan sosial yang diperuntukan bagi disabilitas berat serta lansia dengan usia diatas 70 tahun.
 4. Terkait Jumlah bantuan dana yang diterima KPM sejak penambahan komponen, sejak 2020 bantuan yang diterima KPM yaitu Rp. 3.000.000 (untuk ibu hamil/nifas, kategori anak usia 0 s.d 6 Tahun), kategori Pendidikan anak SD/Sederajat Rp. 900.000, Kategori anak SMP/Sederajat Rp. 1.500.000, kategori Pendidikan anak SMA/Sederajat Rp. 2.400.000, kategori Lanjut Usia 70 Tahun keatas Rp. 2.400.000. bantuan tersebut diberikan kepada KPM setiap tahun dengan 4 (empat) tahap.
 5. Meskipun Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon dalam implementasi nya sudah cukup baik, tetapi masih saja terdapat beberapa kendala dalam proses implementasinya

dimanaa masih ada peserta yang ingin mendaftar tetapi datannya belum divalidasi, data dri BPS Kabupaten Bantul sudah cukup valid namun Ketika dilapangan masih ditemukan data yang tidak valid dan fasilitas untuk pendampingan yang kurang memadai.

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di atas maka dalam implementasi menurut Edward III yaitu, komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam perlindungan dan jaminann sosial dengan UPPKH dan TKSK Kapanewon Sewon sudah baik, jelas dan konsisten. Karena komunikasi dan koordinasi yang disampaikan kepada KPM berupa sosialisasi yang dilakukan setiap bulannya Bersama dengan penyaluran bantuan sudah konsisten dan sapat dipahami oleh masyarakat. Sumber daya, dalam implementasi Pendamping Program Keluarga Harapan Kapanewon Sewon, TKSK, staf dalam hal fasilitas kurang maksimal karena pendamping masih harus menyampaikan berulang kali agar masyarakat paham. Disposisi atau sikap yang diterapkan pelaksana (implementor) dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Sewon sudah cukup baik, karena pendamping sebagai pelaksana PKH maka sikap yang harus diterapkan kepada peserta PKH harus baik sebab ada sanksi bagi pendamping dan peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen. Struktur birokrasi terkait pelaksanaan PKH di Kecamatan Sewon berjalan cukup baik hingga sampai saat ini, karena adanya SOP yang telah ditetapkan oleh Kemensos untuk selanjutnya dilaksanakan penanggung jawab masing-masing. Serta fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terhadap program berjalan dengan baik sebab adanya koordinasi

yang baik antar jajaran.

Bibliography

- Ade Eka Kurniawan. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 33.
- Agustin, A. (2014). Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 735–739.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132>
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai Burhanuddin. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna*, April, 1–23.
- Haerul, Akib, H., & . H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Harahap, S. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Tapanuli Selatan. 4(1), 1–72.
- Haryanto, Sumardjo, Y., Amanah, S., & Tjitropranoto, P. (2017). Efektivitas Peran Penyuluh Swadaya Dalam Pemberdayaan Petani. *Jurnal Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 20(2), 141–154.
- Kartiawati. (2017). Analisis efektivitas program keluarga harapan (pkh) dalam pengentasan kemiskinan ditinjau dari perspektif ekonomi islam.
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2015). Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 71. <https://doi.org/10.22146/jkap.7535>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Norsanti, N., & Safitri, W. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v4i1.2335>
- Nurul Najidah. (2013). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purwanto, S. A., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto) The Policy Implementation of Prosperous Family Program (PKH) in Giving Social Protection to The Poor Community). *Wacana*, 16(2), 79–96. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif [Qualitative Data Analysis].

- Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81.
- Sabarisman, M. (2018). Penanggulangan kemiskinan selalu digiatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan dari tahun ke tahun. 145– 161.
- Siti Nur Aisah. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Bulletin of Management and Business*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.31328/bmb.v1i2.100>
- Sudrajat, M., Sumpena, D., & Azis, R. (2017). Peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 1–21.
- Usman, C. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi Di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(001), 1200.
- Yulita, R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fisip*, 3(2), 1689–1699.
- Yuni Astuti. (2014). Persepsi Masyarakat Prasejahtera Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Distributif Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
- Yunus, E. Y. (2021). Mendampingi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan. 3(1), 62–70.